

ANALISIS PENILAIAN MATERIALITAS LAPORAN KEBERLANJUTAN PADA 15 PERUSAHAAN MULTIFINANCE

Cindy FELIYANTI¹

¹Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Indonesia. Corresponding Author. Email: cindy.feliyanti22@gmail.com

Article Info	Abstract
<p>Keywords:</p> <p><i>Materiality; Sustainability report; Financing services; Stakeholders; Multifinance.</i></p> <hr/> <p>Citation:</p> <p><i>Feliyanti, C. (2022). ANALISIS PENILAIAN MATERIALITAS LAPORAN KEBERLANJUTAN PADA 15 PERUSAHAAN MULTIFINANCE. Jurnal Akuntansi, 11(1)</i></p> <hr/> <p>DOI</p> <p><i>https://doi.org/10.46806/ja.v11i1.814</i></p> <hr/> <p>URL:</p> <p><i>https://jurnal.kwikkiangie.ac.id/index.php/JA/article/view/814</i></p>	<p><i>The background is materiality which is emphasized in the report guidelines in order to improve the quality of sustainability reports. Related to the company's social, economic, and environmental issues. The lack of research discussing the materiality analysis of sustainability reports, prompted the authors to raise issue about the definition of materiality, stakeholder engagement, and identification of key materiality issues. This study aims to determine the practice of materiality assessment in sustainability reports in current financing services. Using stakeholder theory, legitimacy theory, and sustainability reporting standards. Taking 12 qualitative studies on materiality and non-materiality, and 7 quantitative studies on CSR. This research method is qualitative with a research design that examines the materiality aspect of sustainability reports reported by 15 companies in the financing services sub-sector. 4 companies provided an explanation of how materiality was defined, while the other companies only developed their own approach without GRI guidelines. And only 2 companies provided detailed information of stakeholder engagement. And 3 companies that convey the main materiality problems indicated. Therefore, there is still a lack of uniformity in sustainability reports related to materiality assessment, lack of completeness and transparency in Indonesia, especially for companies in the financing services sub-sector.</i></p>

1. Pendahuluan

Laporan keberlanjutan merupakan suatu laporan yang wajib dibuat menurut POJK no. 51/POJK.03/2017 oleh para perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Kewajiban yang dikeluarkan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini menyebabkan dalam beberapa terakhir muncul lonjakan laporan keberlanjutan perusahaan yang membuktikan bahwa perusahaan mulai memiliki rasa kepedulian terhadap keberlanjutan dalam hal sosial, ekonomi, dan lingkungan. Namun, dalam penyusunan laporan keberlanjutan diperlukan adanya suatu standar atau bahasa universal yang mengatur. Salah satu standar yang mengatur laporan keberlanjutan ini adalah GRI Standar (2016).

Menurut GRI Standar (2016) prinsip pelaporan laporan keberlanjutan mencakup empat prinsip yaitu inklusivitas pemangku kepentingan, konteks keberlanjutan, materialitas, dan kelengkapan. Materialitas mengidentifikasi topik berdasarkan dua dimensi yaitu suatu bahasan yang mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan yang diberikan oleh organisasi pelapor atau secara substantif memberikan pengaruh terhadap penilaian dan keputusan pemangku kepentingan.

Dengan adanya lonjakan laporan keberlanjutan yang diterbitkan oleh para emiten memungkinkan banyaknya ketidaklengkapan dan inkonsistensi yang teridentifikasi sebagai keterbatasan utama dalam materialitas laporan keberlanjutan, serta aspek yang beragam terkadang bertentangan dengan masalah sosial, lingkungan dan ekonomi yang meluas sehingga mempersulit perusahaan untuk dapat memprioritaskan topik material dalam penyusunan laporan keberlanjutan.

Adapun penelitian terdahulu terkait dengan materialitas yakni *Sustainability Reporting for Inland Port Managing Bodies: A Stakeholder-Based View on Materiality*, Geerts & Dooms (2020). *Materiality Analysis*

in Sustainability and Integrated Reports, Beske et al., (2020). *Materiality Analysis in Sustainability Reporting: A Tool for Directing Corporate Sustainability Towards Emerging Economic, Environmental and Social Opportunities*, Calabrese et al., (2019). *Guiding Materiality Analysis for Sustainability Reporting: The Case of Agri-Food Sector*, Bellantuono et al., (2018). *Matter of Opinion Exploring the Socio-Political Nature of Materiality Disclosures in Sustainability Reporting*, Puroila & Mäkelä, (2019). *Materiality and External Assurance in Corporate Sustainability Reporting: An Exploratory Case Study of The UK Construction Industry*, Jones et al., (2018). *Materiality Assesment in Sustainability Reporting: Case Study of the Airline Industri*, Aryal, (2017).

Sejumlah besar penelitian yang telah membahas tentang materialitas laporan keberlanjutan hanya berfokus pada pengungkapan keberlanjutan entitas yang mana menyelidiki tentang bagaimana tata kelola perusahaan, struktur perusahaan, gambaran konsep laporan keuangan, dan pelaporan keberlanjutan terhadap kinerja keuangan. Sehingga mendorong peneliti untuk fokus membahas terkait penilaian materialitas laporan keberlanjutan khususnya pada 15 perusahaan industri multifinance. Adapun penelitian ini menggunakan perspektif kualitatif dimana mempertimbangkan kebutuhan teoritis dan praktis untuk memperjelas definisi materialitas, keterlibatan pemangku kepentingan, dan masalah materialitas utama yang teridentifikasi dalam laporan keberlanjutan.

1.2 Teori Pemangku Kepentingan

Freeman & David (1983) mengemukakan bahwa definisi dari pemangku kepentingan adalah setiap kelompok maupun perorangan yang memiliki pengaruh atas tercapainya tujuan perusahaan, dan dalam teori pemangku kepentingan itu sendiri ditekankan pada peranan manajemen dalam menilai pentingnya pertemuan pemangku kepentingan sebagai tuntutan untuk tercapainya tujuan perusahaan yang strategis. Sedangkan Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) adalah teori yang mengilustrasikan kepada pihak mana saja perusahaan harus bertanggung jawab. Dalam teori ini manajemen organisasi dan etika atas bisnis yang berkaitan erat dengan nilai serta moral dalam mengelola suatu organisasi.

Menurut Freeman & David (1983) dibagi menjadi dua kategori besar berdasarkan karakteristiknya yaitu pemangku kepentingan primer dan sekunder. Pemangku kepentingan primer antara lain sekelompok investor, karyawan, konsumen, serta pemasok yang memiliki peran penting terhadap keberlangsungan perusahaan. Sedangkan pemangku kepentingan sekunder yaitu komunitas dan juga pemerintah, dimana tidak adanya hubungan secara khusus dengan transaksi perusahaan namun secara tidak langsung memiliki pengaruh dan dapat dipengaruhi oleh perusahaan.

1.3 Teori Legitimasi

Menurut Suchman (1995) legitimasi didefinisikan sebagai asumsi atau tanggapan umum atas langkah suatu entitas yang diharapkan, pantas, atau sesuai dengan beberapa sistem nilai, aturan, keyakinan, dan pernyataan yang dibangun secara sosial.

Menurut Linblom (1994) definisi legitimasi adalah kondisi dimana sistem nilai suatu entitas jalan dengan sistem nilai masyarakat. Sehingga dalam hal ini, sangat penting untuk memenuhi ketentuan serta harapan masyarakat untuk meyakinkan keberlangsungan hidup perusahaan untuk jangka panjang. Selain itu, pendukung teori ini memiliki berpendapat bahwa laporan keberlanjutan cenderung untuk menekan risiko adanya tindakan regulasi dan boikot oleh pemangku kepentingan, serta mendukung izin perusahaan untuk terus beroperasi.

Asumsi sosial dari aktivitas organisasi diperlukan adanya kesesuaian dengan keinginan dan harapan masyarakat, karena dalam keadaan dimana kegiatan perusahaan tidak sesuai dengan nilai dan adab yang berlaku, maka organisasi tersebut berpotensi mendapatkan teguran dari masyarakat, teguran ini bahkan dapat menyebabkan organisasi berada dalam kegagalan.

Strategi sosial yang dibentuk pada ulasan kebijakan yang komprehensif dalam jangka waktu panjang guna memperkuat kepercayaan terhadap kepercayaan masyarakat, serta dijadikan bekal sosial dalam menjalankan praktik perusahaan dengan penuh strategi. Bentuk komprehensif ini adalah dengan menyelenggarakan pelayanan masyarakat secara menyeluruh guna meminimalisir ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah, serta sebagai bentuk dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada penanggung jawab kebijakan sosial yaitu pemerintah.

1.4 Laporan Keberlanjutan

Menurut David, et al(2008) definisi tanggung jawab sosial perusahaan yang berkaitan dengan hubungan perusahaan dan masyarakat dimana perusahaan itu beroperasi. Adapun definisi lain yang berkenaan dengan tanggung jawab perusahaan ialah hubungan antara perusahaan dan pemangku kepentingan.

Menurut Wood (1991) corporate social responsibility (CSR) didefinisikan sebagai tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan yang berasal dari gagasan bahwa bisnis dan masyarakat saling memiliki keterkaitan dan menurut McWilliams & Siegel (2001) bahwa perusahaan perlu mempromosikan beberapa kebaikan sosial di samping apa yang diwajibkan oleh hukum.

Tanggung jawab sosial perusahaan memiliki konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala dimensi fungsional perusahaan terhadap segala bentuk masalah yang memiliki dampak pada lingkungan. Sehingga tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya berfokus pada konsep pemberian bantuan berupa dana kepada lingkungan sosial, namun berkaitan dengan bagaimana perusahaan memperlakukan dan menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak.

1.5 GRI Standar

GRI (2016) *Global Reporting Initiative* adalah sebuah wadah internasional yang berdiri sendiri yang menyokong perusahaan atau bisnis serta bertanggung jawab atas dampak yang dialami, dengan menyediakan satu bahasa yang global atau umum untuk dapat menyampaikan dampak tersebut.

Adapun tujuan dari GRI standar itu sendiri adalah untuk menciptakan suatu prosedur pokok terkait akuntabilitas yang dapat menjamin suatu perusahaan agar patuh atas hakikat dari sikap terhadap lingkungan yang bertanggung jawab, yang selanjutnya dapat diperluas termasuk pada masalah tata kelola, sosial dan ekonomi.

1.6 AA1000AP

AA1000AP (2018) memberikan satu set rangkaian terkait prinsip pedoman praktis yang diterima dengan luas secara internasional pada organisasi atau perusahaan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi, memajukan, dan memberikan komunikasi tanggung jawab dan kemampuan keberlanjutan mereka. Serta memberikan pedoman terkait seperti apa organisasi/perusahaan dapat menjadi dan tetap memiliki rasa tanggung jawab atas hasil dan konsekuensinya terhadap sistem ekologi secara lebih luas.

Yang dapat diterapkan pada seluruh macam dan skala organisasi/perusahaan, terpenting dirancang untuk perusahaan-perusahaan yang mana dimaksudkan untuk mengembangkan pendekatan yang lebih terbuka, bertanggung jawab, serta esensial untuk mengendalikan kemampuan keberlanjutan.

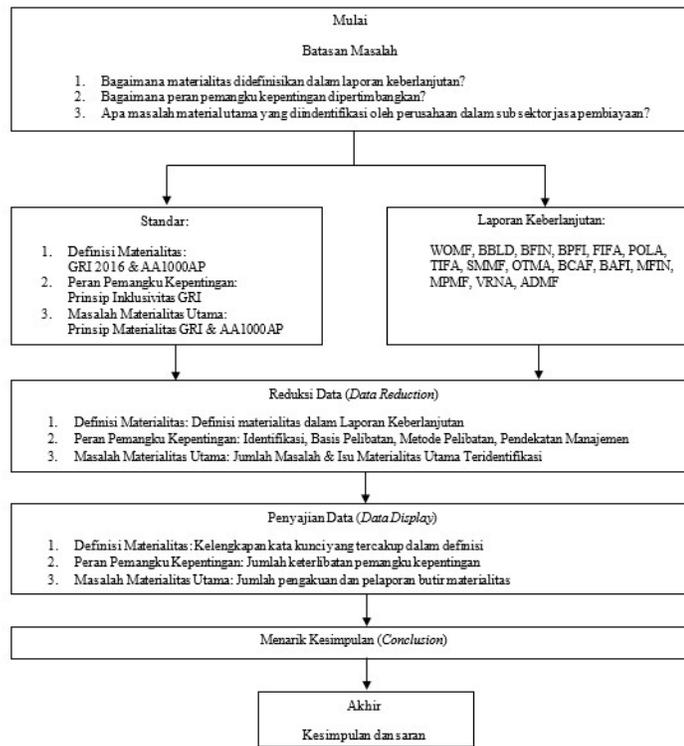
1.7 POJK No. 51/POJK.03/2017

POJK No. 51 Tahun 2017 mengatur mengatur terkait penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Bertujuan untuk melaksanakan perekonomian lokal yang inklusif, sebanding, dan memiliki keberlanjutan dengan maksud akhir mewariskan kesejahteraan dari segi sosial dan ekonomi bagi semua, serta melindungi dan mengawasi lingkungan hidup.

Adapun maksud penerapan keuangan berkelanjutan adalah untuk menyediakan sumber daya keuangan yang memadai guna mencapai tujuan pembangunan yang berkaitan perubahan iklim, memperkuat ketahanan dan daya saing LJK, emiten, dan perusahaan publik dengan upaya manajemen risiko lingkungan dan sosial yang lebih baik dan/atau jasa yang menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan untuk memberikan kontribusi positif bagi keseimbangan sistem keuangan, meminimalisir ketimpangan sosial, meminimalisir kerusakan lingkungan, melindungi keanekaragaman hayati dan mendukung efisiensi penggunaan energi dan sumber daya alam. Serta meningkatkan pengembangan produk dan/atau jasa keuangan yang menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang, teori, dan standar yang digunakan pada penelitian ini kerangka pemikiran diatas maka dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1: Kerangka Pemikiran



Sumber : Data diolah kembali

2. Metode Penelitian

Penggunaan objek pada penelitian ini 15 laporan keberlanjutan dari perusahaan publik yang bergerak di bidang jasa pembiayaan atau lebih dikenal dengan sebutan multifinance yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diunduh melalui website resmi masing-masing perusahaan. Pemilihan sample dilakukan dengan cara *purposive sampling method* dengan kriteria-kriteria pengambilan sample, yaitu: (1) Perusahaan jasa pembiayaan yang terdaftar di BEI (2) Perusahaan mempublikasikan laporan keberlanjutan (3) Perusahaan menyediakan menu laporan keberlanjutan pada laman *website* resmi perusahaan.

2.1 Variabel Penelitian

Adapun variabel penelitian ini adalah :

1. Definisi isu materialitas, yaitu jumlah kata kunci yang mencakup definisi dari isu materialitas dinyatakan pada Laporan Keberlanjutan.
2. Keterlibatan pemangku kepentingan, yaitu daftar pemangku kepentingan, jumlah frekuensi pertemuan para pemangku kepentingan yang diadakan dalam tahap identifikasi, penetapan, proses dari topik material Laporan Keberlanjutan.
3. Identifikasi masalah material utama, yaitu terkait dengan jumlah pengakuan dan pelaporan butir materialitas pada tingkat tinggi.

2.2 Teknik Pengumpulan Data

Adapun data yang digunakan yaitu peneliti memakai data berupa dokumen yang sudah ada. Dalam hal mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi dokumentasi dengan mengamati dan mengumpulkan laporan keberlanjutan yang diterbitkan oleh 15 perusahaan sub sektor jasa pembiayaan, yang mana tersedia di laman *website* resmi dari masing-masing perusahaan. Selain itu,

peneliti melakukan riset pustaka dengan mempelajari literatur berupa karya ilmiah ataupun *text book* yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian guna menjadi landasan teori penelitian ini.

2.3 Teknik Analisis Data

Menurut Uma Sekaran & Bougie (2019) data kualitatif adalah data yang berupa kata. Adapun contoh dari data kualitatif adalah memo wawancara, transkrip dari kelompok fokus, jawaban dari pertanyaan secara terbuka, transkrip dari rekaman video, kisah pengalaman yang terdapat di internet, bacaan berita. Data kualitatif didapatkan dari berbagai macam sumber, baik sumber primer ataupun sekunder, contohnya data dari individu, kelompok, catatan sebuah perusahaan, publikasi dari pemerintah, dan internet. Adapun tujuan dari data kualitatif adalah membuat kesimpulan absah dari sekumpulan data yang sering kali tidak sesuai dan dibuat berlebihan. Terdapat tiga langkah penting dalam hal analisis data kualitatif yaitu sebagai berikut :

1. Reduksi Data (Data Reduction)
Pengumpulan dari data kualitatif akan menghasilkan data dalam jumlah yang cukup besar, sebab itu langkah utama yang perlu dilaksanakan dalam analisis data yaitu reduksi data yang menggunakan pengkodean dan pengkategorian. Dalam hal ini pengkodean adalah proses analisis di mana data kualitatif yang telah terkumpul dilakukan reduksi, penyusunan ulang, dan pengintegrasian untuk terbentuknya sebuah teori. Adapun tujuan dari pengkodean ini adalah guna membantu dalam mengambil kesimpulan yang cukup berarti dari data. Kode dalam hal ini pun berupa label yang disematkan pada kesatuan teks yang setelah itu dikelompokkan menjadi kategori. Pengkodean pun sangat sering berupa proses yang berulang, sehingga mengharuskan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terkait data tersebut dengan mengenali pola, menemukan hubungan antar data, serta mengatur data dalam kategori yang terpadu.
Pada penelitian ini, data akan dikumpulkan dengan cara mengunduh Laporan Keberlanjutan dari website resmi masing-masing perusahaan yang mana data tersebut berbentuk Laporan Keberlanjutan dari 15 perusahaan yang dipilih.
2. Penyajian Data (Data Display)
Penyajian data adalah langkah kedua dari aktivitas utama yang harus dilalui pada saat melakukan analisis data kualitatif. Penyajian data dalam hal ini menyertakan pemungutan data yang telah dilakukan reduksi dan menyajikannya ke dalam bentuk yang terorganisir. Dalam hal ini penyajian data yang seringkali dilakukan adalah berupa bagan, matriks, diagram, grafik, frase, ataupun gambar yang dapat membantu dalam mengatur data serta menemukan suatu pola dan hubungan dalam data tersebut, sehingga dapat memfasilitasi kesimpulan. Pada penelitian ini, setelah melalui tahap reduksi data yaitu dengan mengumpulkan Laporan Keberlanjutan yang terdapat pada website resmi masing-masing perusahaan, peneliti mengidentifikasi standar yang digunakan dan mengidentifikasi isi Laporan Keberlanjutan berdasarkan definisi materialitas, keterlibatan pemangku kepentingan, dan masalah materialitas utama.
3. Menarik Kesimpulan (Drawing Conclusion)
Menarik kesimpulan adalah kegiatan akhir dalam proses analisis data kualitatif serta inti dari analisis data yang bertujuan untuk mencari makna, arti, serta penjelasan terhadap data yang dianalisis dengan mencari dan menemukan hal penting. Pada aktivitas inilah peneliti menjawab pertanyaan terkait tema yang telah diidentifikasi serta memberikan penjelasan terkait pola dan hubungan yang telah diamati, atau dengan membuat perbandingan yang jelas. Secara umum, tata cara pengolahan data berawal dengan penulisan data mentah (data lapangan), kemudian ditulis ulang dengan bentuk kombinasi dan penggolongan data, lalu dirangkum, disusun, dan dievaluasi melalui beberapa teknik. Pada penelitian ini, tahap menarik kesimpulan berdasarkan analisis yang dilakukan sebelumnya untuk menjawab masalah dari penelitian sesuai dengan prinsip GRI dan AA1000AP. Adapun demikian, kesimpulan diambil berdasarkan kata kunci yang diidentifikasi dalam tahap analisis yang berkaitan dengan ketiga masalah utama yaitu definisi material, keterlibatan peran pemangku kepentingan, dan masalah materialitas utama yang teridentifikasi dalam perusahaan sub sektor Jasa Pembiayaan.

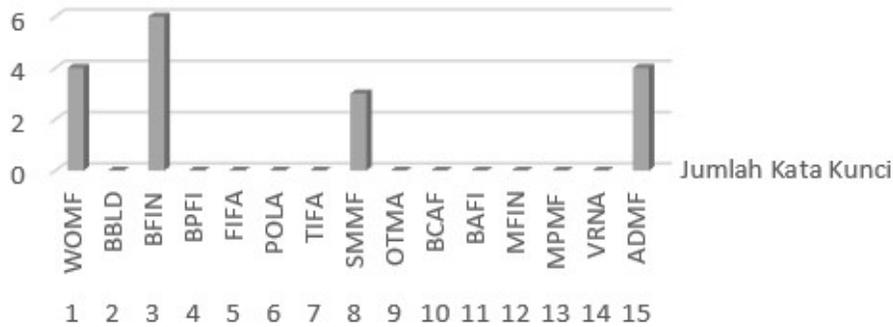
3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Definisi Materialitas

Terkait definisi isu materialitas yang dianalisis, sangat sedikit emiten sub sektor Jasa Pembiayaan yang memiliki definisi materialitas dalam laporan keberlanjutan yang dipublikasikan. Hanya terdapat empat emiten

yang menyampaikan definisi materialitas yaitu PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOMF), PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN), PT Sinar Mas Multifinance Tbk (SMMF), PT Adira Dinamika Multifinance Tbk (ADMF). Sebagian besar dari keempat emiten ini mendefinisikan materialitas sebagai isu yang memiliki dampak yang cukup signifikan bagi para pemangku kepentingan, serta bagi kinerja berkelanjutan. Jumlah kata kunci yang terjaring dari masing-masing emiten tersebut dapat dilihat melalui gambar dibawah ini :

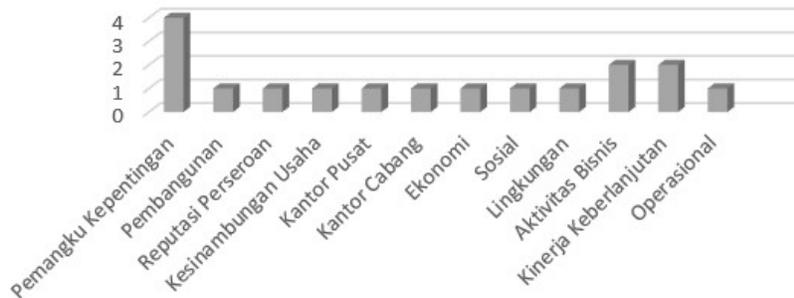
Gambar 2: Jumlah Kata Kunci Definisi Materialitas



Sumber : Data diolah kembali

Selain itu, jumlah kata kunci yang terjaring dalam definisi materialitas laporan keberlanjutan emiten yaitu terdapat 17 kata kunci dari 4 emiten yang mendefinisikan materialitas. Adapun kata kunci tersebut yaitu pemangku kepentingan, pembangunan, reputasi perseroan, kesinambungan usaha, kantor pusat, kantor cabang, ekonomi, sosial, lingkungan, aktivitas bisnis, kinerja keberlanjutan, dan operasional. Kata kunci yang paling banyak digunakan adalah pemangku kepentingan, dari 4 emiten tersebut semua emiten menyampaikan bahwa definisi materialitas menurut mereka adalah isu yang memiliki pengaruh signifikan terhadap para pemangku kepentingan. Selain itu, terdapat 2 emiten yang mendefinisikan materialitas sebagai isu yang berpengaruh juga terhadap aktivitas bisnis dan kinerja keberlanjutan emiten. Terkait frekuensi penggunaan kata kunci dapat dilihat melalui gambar berikut :

Gambar 3: Frekuensi Penggunaan Kata Kunci dalam Definisi Materialitas



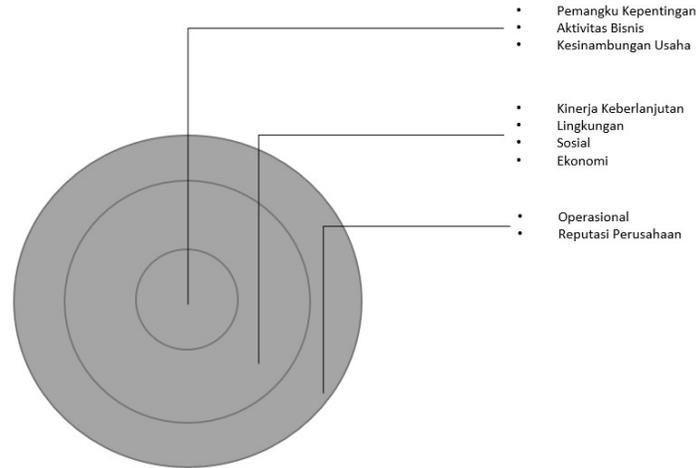
Sumber : Data diolah kembali

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa sangat sedikit emiten jasa pembiayaan yang dianalisis menyampaikan definisi materialitas dari penilaian materialitas di dalam laporan keberlanjutan. Dari lima belas emiten jasa pembiayaan hanya PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk, PT BFI Finance Indonesia Tbk, PT Sinar Mas Multi Finance Tbk, PT Adira Dinamika Multifinance Tbk yang memberikan penjelasan tentang bagaimana materialitas didefinisikan dalam perusahaan mereka, serta melakukan analisis materialitas berdasarkan pedoman GRI 2016. Sehingga melalui pengungkapan definisi materialitas ini, emiten dianggap memiliki kesadaran akan menciptakan dan menyampaikan pemahaman secara menyeluruh kepada pemangku kepentingan dan sejalan dengan kriteria kepatuhan prinsip materialitas yang dikemukakan AA1000AP.

Pemahaman keempat emiten ini dapat terlihat dari bagaimana mereka menyampaikan definisi materialitas dan kata kunci yang mereka berikan dalam laporan keberlanjutan.

Adapun demikian, terdapat kata kunci utama yaitu pemangku kepentingan, aktivitas bisnis, dan kesinambungan usaha. Kedua kata kunci ini juga dijadikan dasar dalam penentuan prioritas masalah materialitas. Urutan kata kunci lebih jelas dapat dilihat melalui gambar dibawah ini :

Gambar 4: Kata Kunci Berdasarkan Substansi Definisi Materialitas



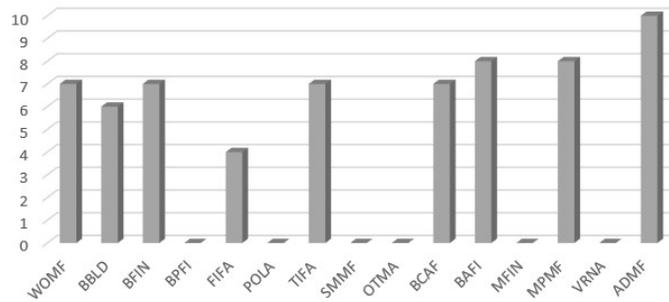
Sumber : Data diolah kembali

Demikian dapat dikatakan bahwa masih banyak emiten sub sektor jasa pembiayaan hanya mengembangkan pendekatan mereka sendiri tanpa menggunakan standar GRI 2016, sebagian besar emiten sub sektor jasa pembiayaan hanya menggunakan acuan POJK No. 51/POJK.03/2017, POJK No.35/POJK.05/2018, POJK No.14/POJK.05/2020 pada laporan keberlanjutan. Dalam melaksanakan penilaian materialitas agar dapat sejalan dengan pedoman, beberapa perusahaan juga membentuk suatu komite keberlanjutan, di mana hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dalam sub sektor jasa pembiayaan berusaha untuk mempertahankan legitimasi sebagai representasi hubungan yang perlu di jaga antara perusahaan dengan pemangku kepentingan. Sehingga, perusahaan aktif dalam menanggapi isu yang berkaitan dengan isu sosial, lingkungan, dan ekonomi guna memenuhi harapan para pemangku kepentingan.

3.2 Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Berdasarkan keterlibatan pemangku kepentingan yang dianalisis, banyak emiten sub sektor Jasa Pembiayaan yang sudah menyampaikan terkait daftar kelompok pemangku kepentingan. Dari 15 emiten terdapat 9 emiten yang menyampaikan daftar kelompok pemangku kepentingan mereka. Adapun PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (ADMF) merupakan emiten dengan daftar pemangku kepentingan terbanyak yaitu 10 pemangku kepentingan, dan beberapa emiten lainnya rata-rata menyampaikan daftar pemangku kepentingan mereka sebanyak 7 sampai 8 pemangku kepentingan. Selain itu, PT Federal International Finance Tbk menyampaikan paling sedikit daftar pemangku kepentingannya yaitu 4 pemangku kepentingan. Terkait jumlah daftar pemangku kepentingan yang disampaikan oleh masing-masing emiten dapat dilihat melalui gambar dibawah ini :

Gambar 5: Jumlah Pemangku Kepentingan

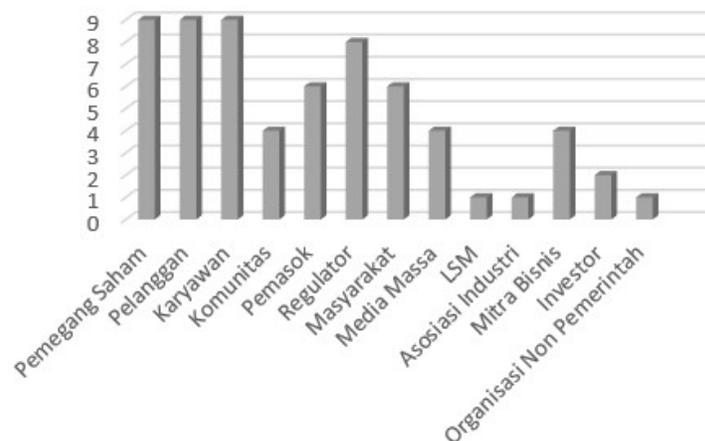


Sumber : Data diolah kembali

Meskipun demikian, dari 9 emiten yang menyampaikan daftar pemangku kepentingan, hanya terdapat 2 emiten yang menjalankan prinsip materialitas yaitu prinsip inklusivitas pemangku kepentingan dengan baik yaitu dengan menyampaikan terkait basis penetapan, topik materialitas yang diangkat dari masing-masing pemangku kepentingan, frekuensi pertemuan dilakukan, tahap pelibatan pemangku kepentingan, dan pendekatan manajemen atas isu materialitas. Adapun 2 emiten ini adalah PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk dan PT Adira Dinamika Multifinance Tbk.

Secara garis besar kelompok pemangku kepentingan yang terlibat dalam penilaian materialitas laporan keberlanjutan masing-masing emiten sama. Namun ada beberapa emiten yang menyampaikan daftar pemangku kepentingan dengan lebih rinci. Setelah melewati tahap reduksi data, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemangku kepentingan yang paling banyak diangkat dalam sub sektor Jasa Pembiayaan adalah Pemegang Saham, menurut GRI (2016) pemegang saham merupakan entitas atau individu yang diperkirakan akan dipengaruhi secara signifikan oleh adanya kegiatan, produk, dan jasa organisasi pelapor; atau yang tindakannya diperkirakan akan memberikan pengaruh kemampuan organisasi dalam menerapkan strategi dan pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, Pelanggan, Karyawan, Regulator, Masyarakat, Mitra Bisnis, dan Media Massa juga merupakan pemangku kepentingan yang banyak dilibatkan dalam penilaian materialitas. Hal tersebut dapat dilihat melalui gambar frekuensi penggunaan pemangku kepentingan dibawah ini :

Gambar 6: Frekuensi Penggunaan Pemangku Kepentingan dalam Penilaian Materialitas

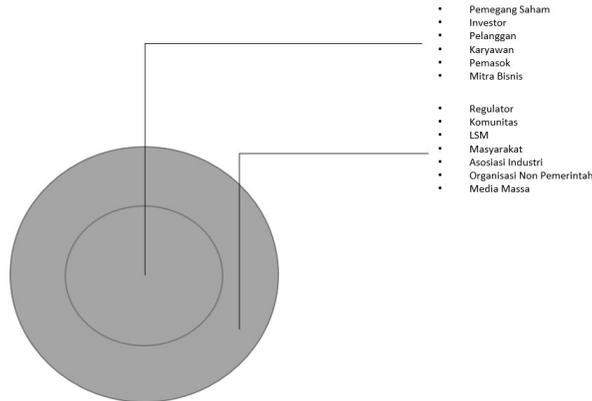


Sumber : Data diolah kembali

Pemangku kepentingan merupakan salah satu bagian penting dari penilaian materialitas, menurut GRI pemangku kepentingan sebagai suatu individu yang secara signifikan dipengaruhi oleh segala aktivitas, produk, serta layanan organisasi yang mana tindakannya secara wajar dapat diharapkan memberikan pengaruh kepada kemampuan organisasi untuk dapat menerapkan strategi dan mencapai tujuannya. Umumnya pemangku kepentingan yang berbeda terlibat dalam proses penilaian materialitas, serta terlibat dalam berbagai tahapan proses dalam laporan yang dianalisis.

Berdasarkan teori Freeman & David (1983) pemangku kepentingan berdasarkan karakteristiknya dibagi menjadi dua bagian yaitu primer dan sekunder. Adapun demikian, pada penelitian ini pemangku kepentingan dikelompokkan menjadi dua jenis yang diambil dari hasil penelitian terkait frekuensi kelompok pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan primer dalam sub sektor jasa pembiayaan adalah Pemegang Saham, Investor, Pelanggan, Karyawan, Pemasok, dan mitra bisnis. Sedangkan pemangku kepentingan sekunder yaitu Regulator, Komunitas, LSM, Masyarakat, Asosiasi Industri, Organisasi Non Pemerintah, dan Media Massa.

Gambar 7: Kelompok Pemangku Kepentingan Berdasarkan Jenisnya



Sumber : Data diolah Kembali

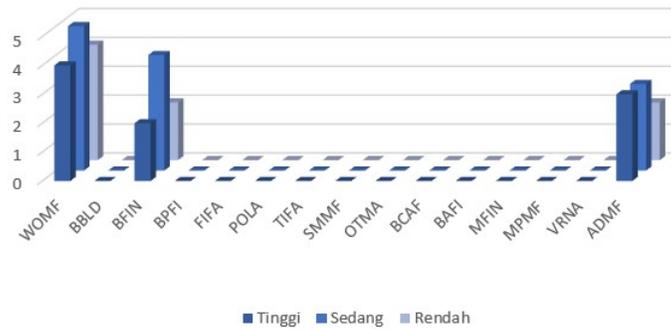
Berdasarkan hasil penelitian dari 15 emiten yang diambil sebagai sampel, sebagian besar emiten sub sektor jasa pembiayaan menyebutkan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses penilaian materialitas, emiten tersebut adalah PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk, PT Buana Finance Tbk, PT BFI Finance Tbk, PT Federal International Tbk, PT KDB Tifa Finance Tbk, PT BCA Finance Tbk, PT Bussan Auto Finance Tbk, PT Mitra Pinasthika Mustika Finance Tbk, PT Adira Dinamika Multifinance Tbk.

Adapun diantaranya yang memberikan informasi rinci mengenai basis penetapan, tahap, dan metode pelibatan pemangku kepentingan adalah PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk dan PT Adira Dinamika Multifinance Tbk. Dapat dikatakan bahwa dalam sub sektor jasa pembiayaan dalam hal identifikasi pemangku kepentingan dilakukan sudah cukup baik dan sejalan dengan prinsip inklusivitas pemangku kepentingan. Selain itu, dalam pendekatan manajemen terhadap keberlanjutan, beberapa emiten mengungkapkan upaya tersebut dengan membentuk unit atau komite khusus atau menunjuk petugas terkait keberlanjutan dan ada juga yang pendekatannya dilakukan langsung oleh dewan direksi, sehingga sejalan dengan kriteria kepatuhan prinsip materialitas yang dikemukakan AA1000AP pada bagian komitmen.

3.3 Masalah Materialitas Utama Teridentifikasi

Berdasarkan hasil penelitian masalah materialitas utama yang teridentifikasi, hanya terdapat 4 emiten yang menyampaikan masalah materialitas utama mereka baik dalam bentuk matriks dan tabel materialitas. Jumlah masalah yang teridentifikasi pun cukup beragam, dan PT Wahana Ottomitra Multi Artha Tbk mengidentifikasi masalah materialitas utama paling banyak yaitu 13 masalah yang teridentifikasi, adapun diantara 13 masalah tersebut dibagi pada 3 tingkatan materialitas yaitu tinggi, sedang, rendah. Adapun demikian, dapat dilihat bahwa masih banyak emiten yang tidak menyampaikan masalah materialitas utama dalam laporan keberlanjutan mereka.

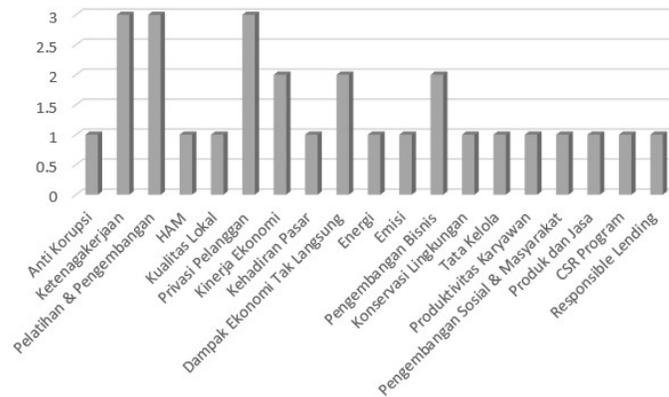
Gambar 8: Masalah Materialitas Utama Teridentifikasi



Sumber : Data diolah kembali

Dari keempat emiten yang menyampaikan isu materialitas mereka kedalam bentuk matriks dan tabel materialitas, terdapat 1 emiten yang tidak memberikan pengelompokan terkait tingkatan isu materialitas mereka baik tinggi, sedang, maupun rendahnya isu tersebut. Sehingga di dalam diagram diatas hanya tertera 3 emiten. Beberapa perusahaan menyampaikan isu terkait sosial, ekonomi, dan lingkungan, namun tidak mengangkat isu materialitas dan menyampaikan mengapa isu yang mereka angkat dianggap material. Selain itu, masih banyak emiten yang tidak menyampaikan isu materialitas dalam laporan keberlanjutan mereka. Adapun frekuensi penggunaan atas masing-masing isu materialitas dapat dilihat melalui gambar dibawah ini:

Gambar 9: Frekuensi Penggunaan Isu Materialitas Utama dalam Penilaian Materialitas



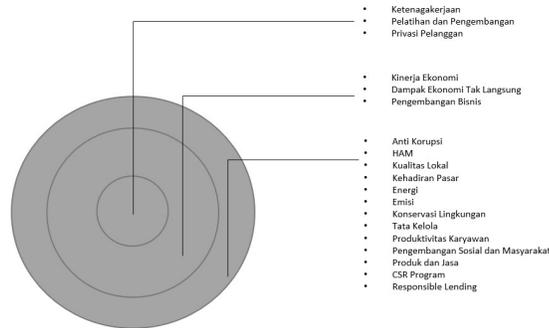
Sumber : Data diolah kembali

Dari hasil penelitian, sebagian besar masing-masing emiten mengangkat isu yang berbeda-beda. Namun, untuk isu materialitas yang paling banyak digunakan oleh masing-masing emiten adalah Ketenagakerjaan, Pelatihan dan Pengembangan, Privasi Pelanggan, Kinerja Ekonomi, Dampak Ekonomi Tak Langsung, dan Pengembangan Bisnis. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa masih banyak perusahaan yang berfokus pada isu sosial dan ekonomi, namun masih kurang mementingkan isu lingkungan. Karena, pada umumnya emiten sub sektor jasa pembiayaan memberikan dampak yang tidak langsung kepada lingkungan.

Pada umumnya, masalah materialitas setiap industri atau sektor akan sangat berbeda. Masalah dapat serupa diantara setiap industri atau sektor, tetapi masalah material berbeda dengan masalah industri atau sektor yang umum. Karena, masalah material bergantung pada ukuran perusahaan, lokasi, waktu pendirian, peran pemangku kepentingan, dan keterlibatan para pemangku kepentingan. Menurut GRI materialitas adalah suatu ambang batas setiap aspek menjadi penting. Oleh karena itu, aspek tersebut perlu dilaporkan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal dalam menentukan masalah materialitas pada aspek sosial, lingkungan dan ekonomi. Adapun demikian, tingkat kepentingan isu materialitas berdasarkan hasil penelitian ini dibagi menjadi 3 yaitu tinggi, sedang, rendah masalah materialitas yang teridentifikasi dan dikelompokkan oleh masing-masing emiten. Isu materialitas tinggi yang sering diangkat oleh emiten sub sektor jasa

pembiayaan antara lain Ketenagakerjaan, Pelatihan dan Pengembangan, serta Privasi Pelanggan. Dari masalah materialitas utama yang diidentifikasi, masalah-masalah tersebut telah mewakili ketiga aspek penting dalam materialitas yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dapat dilihat lebih jelas melaui gambar dibawah ini:

Gambar 10: Tingkat Kepentingan Isu Materialitas Utama



Sumber : Data diolah kembali

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 4 emiten yang menyampaikan terkait materialitas tingkat tinggi atau masalah materialitas utama yang diidentifikasi oleh masing-masing emiten. Adapun 4 emiten tersebut yaitu PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk, PT BFI Finance Indonesia Tbk, PT Sinar Mas Multi Finance Tbk, PT Adira Dinamika Multifinance Tbk. Keempat emiten ini menyampaikan masalah materialitas utama mereka dalam bentuk matriks dan tabel materialitas. Namun terdapat 1 emiten yang tidak memberikan penjelasan terkait isu materialitas tersebut termasuk kedalam tingkatan tinggi, sedang, atau rendah dalam pengaruhnya terhadap pemangku kepentingan, perusahaan, dan lingkungan.

4. Simpulan dan Saran

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun semua laporan keberlanjutan yang dipilih berdasarkan tempat berkedudukan yang sama yaitu Indonesia dan tahun laporan keberlanjutan yang sama yaitu tahun 2020, tetap dideteksi adanya perbedaan yang cukup signifikan terkait penilaian materialitas. Penelitian ini mendeteksi bahwa terdapat variasi mencakup proses serta metode penilaian terkait materialitas pada setiap perusahaan dalam laporan keberlanjutan. Secara keseluruhan lima belas emiten ini sudah patuh dalam melakukan kewajibannya untuk melaporkan laporan keberlanjutan namun dalam penilaian materialitas masih dianggap tidak terlalu penting bagi beberapa emiten. Sehingga beberapa emiten yang memahami materialitas menyampaikan definisi materialitas mereka dalam laporan keberlanjutan disertai dengan kata kunci yang terdapat dari definisi materialitas. Namun tidak sedikit emiten yang gagal dalam mendefinisikan materialitas, tidak menyampaikan definisi materialitas, dan tidak transparan dengan memberikan informasi yang cukup singkat, serta bahkan tidak memberikan informasi yang jelas terkait proses penilaian materialitas dalam laporan keberlanjutan mereka. Dalam keterlibatan pemangku kepentingan, beberapa emiten menyampaikan daftar pemangku kepentingan yang dipilih dan topik yang muncul. Namun tidak memberikan penjelasan rinci terkait basis penetapan, serta metode pelibatan, dan pendekatan manajemen kepada para pemangku kepentingan terkait isu materialitas. Terkait masalah materialitas utama yang teridentifikasi, terdapat perbedaan jumlah masalah serta jenis masalah yang teridentifikasi sangat signifikan berkaitan dengan topik yang muncul dari kelompok pemangku kepentingan dalam mengidentifikasi masalah material utama.

Dengan kata lain, masih banyak emiten yang kurang seragam dalam pengungkapan penilaian materialitas khususnya dalam proses menentukan masalah materialitas, kelengkapan, serta transparansi dalam masalah material yang teridentifikasi. Sebagian besar emiten memberikan informasi yang kurang jelas dan bahkan tidak ada informasi sama sekali terkait proses penilaian materialitas. Kendati demikian, dari 15 emiten yang dipilih tetap ada emiten yang mempelajari bagian analisis materialitas dengan baik sehingga meningkatkan kualitas laporan mereka, dengan taat mengikuti pedoman, memperlihatkan proses yang transparan, serta melibatkan pemangku kepentingan dalam fase analisis materialitas.

Adapun saran bagi perusahaan yang sudah mendefinisikan materialitas, memaparkan terkait keterlibatan pemangku kepentingan, dan mengidentifikasi masalah materialitas utama dengan baik untuk dapat mempertahankan ketiga poin tersebut serta meningkatkan kualitas dan transparansi dari laporan keberlanjutan

itu sendiri. Namun perlu adanya peningkatan secara khusus bagi perusahaan yang dinilai masih kurang dalam memaparkan ketiga poin yang menjadi pokok masalah dalam pembahasan ini, serta diperlukan untuk peningkatan dalam transparansi proses penilaian materialitas dengan mengikuti pedoman yang ada sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keberlanjutan perusahaan, serta menjaga kepercayaan dari para pengguna laporan keberlanjutan itu sendiri. Selain itu, hal yang dapat diperhatikan bagi peneliti selanjutnya adalah untuk dapat mencari isu permasalahan lainnya terkait materialitas dan standar GRI, serta menggunakan objek penelitian dan tahun penelitian terkini dan diperkuat dengan adanya wawancara dari salah satu emiten.

Daftar Pustaka

- Account Ability. (2008). *AA1000 Stakeholder Engagement Standard*.
- Account Ability. (2018). *AA1000 PRINSIP-PRINSIP ACCOUNTABILITY*.
- Account Ability. (2020). *AA1000 Assurance Standard v3*. 1–48. www.accountability.org
- Aryal, N. (2017). *Materiality assessment in sustainability reporting: case study of the airline industry*. 1–64. <https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/54674>
- Bellantuono, N., Pontrandolfo, P., & Scozzi, B. (2018). Guiding materiality analysis for sustainability reporting: The case of agri-food sector. *International Journal of Technology, Policy and Management*, 18(4), 336–359. <https://doi.org/10.1504/IJTPM.2018.096181>
- Beske, F., Hausteine, E., & Lorson, P. C. (2020). Materiality analysis in sustainability and integrated reports. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 11(1), 162–186. <https://doi.org/10.1108/SAMPJ-12-2018-0343>
- Brunstein, J., Sambiasi, M. F., Kerr, R. B., Brunnuquell, C., & Perera, L. C. J. (2020). Sustainability in finance teaching: evaluating levels of reflection and transformative learning. *Social Responsibility Journal*, 16(2), 179–197. <https://doi.org/10.1108/SRJ-07-2018-0164>
- Calabrese, A., Costa, R., Levialdi Ghiron, N., & Menichini, T. (2019). Materiality analysis in sustainability reporting: A tool for directing corporate sustainability towards emerging economic, environmental and social opportunities. *Technological and Economic Development of Economy*, 25(5), 1016–1038. <https://doi.org/10.3846/tede.2019.10550>
- Calabrese, A., Costa, R., & Rosati, F. (2015). A feedback-based model for CSR assessment and materiality analysis. *Accounting Forum*, 39(4), 312–327. <https://doi.org/10.1016/j.accfor.2015.06.002>
- Chedrawi, C., Osta, A., & Osta, S. (2020). CSR in the Lebanese banking sector: a neo-institutional approach to stakeholders' legitimacy. *Journal of Asia Business Studies*, 14(2), 143–157. <https://doi.org/10.1108/JABS-03-2018-0093>
- Ellerup Nielsen, A., & Thomsen, C. (2018). Reviewing corporate social responsibility communication: a legitimacy perspective. *Corporate Communications*, 23(4), 492–511. <https://doi.org/10.1108/CCIJ-04-2018-0042>
- Freeman, R. E., & David, L. R. (1983). Stockholders and Stakeholders: A New Perspective on Corporate Governance. *California Management Review*, 25(3), 88–106. <https://doi.org/10.2307/41165018>
- Geerts, M., & Doms, M. (2020). Sustainability reporting for inland port managing bodies: A stakeholder-based view on materiality. *Sustainability (Switzerland)*, 12(5). <https://doi.org/10.3390/su12051726>
- Global Reporting Initiative. (2016a). *GRI 102 : Pengungkapan Umum 2016*. 1–45.
- Global Reporting Initiative. (2016b). *GRI 103 : Pendekatan Manajemen 2016*. 1–14.
- Global Sustainability Standards Board. (2016). Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI 2016 : 101 Landasan. *Global Reporting Initiative*, 30.
- James Kamwachale Khomba. (2012). Relevance of financial reporting systems: Single-bottom line or triple-

bottom line. *African Journal of Business Management*, 6(9), 3519–3527. <https://doi.org/10.5897/ajbm11.2956>

John Elkington. (1997). *Cannibals with forks The Triple Bottom Line of 21st Century Business*.

Jones, P., Comfort, D., & Hillier, D. (2018). Materiality and external assurance in corporate sustainability reporting: An exploratory case study of the UK construction industry. *World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development*, 14(4), 454–472. <https://doi.org/10.1504/WREMSD.2018.093568>

Lassala, C., Apetrei, A., & Sapena, J. (2017). Sustainability matter and financial performance of companies. *Sustainability (Switzerland)*, 9(9), 1–16. <https://doi.org/10.3390/su9091498>

LINDBLOM, & K., C. (1994). The implications of Organizational Legitimacy for Corporate Social Performance and Disclosure. *Critical Perspectives on Accounting Conference, New York, 1994*. <http://ci.nii.ac.jp/naid/10025885553/en/>

Puroila, J., & Mäkelä, H. (2019). Matter of opinion: Exploring the socio-political nature of materiality disclosures in sustainability reporting. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 32(4), 1043–1072. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-11-2016-2788>

Simatele, M., & Dlamini, P. (2020). Finance and the social mission: a quest for sustainability and inclusion. *Qualitative Research in Financial Markets*, 12(2), 225–242. <https://doi.org/10.1108/QRFM-02-2019-0024>

Stakeholders, L. T. O., Chief, M., Officer, E., Assheton, A., Carter, L. S., Accountability, C., & Board, S. (2013). Stakeholder Engagement Standards. *Encyclopedia of Corporate Social Responsibility*, 2305–2305. https://doi.org/10.1007/978-3-642-28036-8_101479

Suchman, M. C. (1995). Approaches and Strategic Managing Legitimacy. *Academy of Management Review*, 20(3), 571–610. <https://journals.aom.org/doi/abs/10.5465/AMR.1995.9508080331>

Uma Sekaran and Roger Bougie. (2019). *Research Methods for Business. 1*, 105–112.